



KEBIJAKAN AIR MINUM DAN SANITASI

**Pada Pemerintah Daerah
Wilayah Provinsi Kalimantan Timur**

Sebagai Pelaksanaan Arah dan Strategi
Pembangunan Infrastruktur Nasional

RPJM (PERATURAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2020)

Strategi pembangunan nasional arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta prioritas pembangunan, seluruhnya diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional.

Bagi Pemerintah Daerah, RPJM Nasional berfungsi sebagai bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mencapai sasaran Nasional yang termuat dalam RPJM Nasional.

RISALAH MATERI MUATAN DALAM RPJM NASIONAL TERKAIT KEBIJAKAN AIR MINUM DAN SANITASI



**ARAHAN PRESIDEN KEDUA DARI LIMA ARAHAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR**



**STRATEGI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
BIDANG INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR**



**ISU STRATEGIS INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR
PENYEDIAAN AKSES AIR MINUM DAN SANITASI
LAYAK DAN AMAN**

ARAH DAN KEBIJAKAN PENYEDIAAN AKSES AIR MINUM DAN SANITASI SEHUBUNGAN DENGAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

1

**PENINGKATAN TATA KELOLA
KELEMBAGAAN UNTUK
PENYEDIAAN AIR MINUM
LAYAK MAUPUN AMAN**

- Integrasi arah kebijakan dan sasaran pembangunan akses air minum layak maupun aman dalam dokumen perencanaan daerah;
- Peningkatan komitmen melalui alokasi APBD yang memadai;
- Perkuatan peran dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui mekanisme pengendalian dan pembinaan secara berjenjang;
- Peningkatan kualitas perencanaan penyediaan akses air minum yang terintegrasi yang didukung dengan sistem data dan informasi;
- Perkuatan fungsi kelembagaan regulator air minum; serta
- Optimalisasi pendanaan dan pengembangan alternatif pendanaan.

2

**PENINGKATAN KOMITMEN
KEPALA DAERAH UNTUK
LAYANAN SANITASI YANG
BERKELANJUTAN**

- Penyusunan regulasi di daerah mengenai pengelolaan air limbah domestik dan sampah;
- Penyediaan mekanisme insentif bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur sanitasi dan/atau penyediaan subsidi bagi operasional dan pemeliharaan; serta
- Penerapan regulasi daerah yang mengatur kewajiban pembayaran layanan sanitasi oleh masyarakat/konsumen dan mewajibkan rumah tangga untuk menjadi pelanggan layanan pengelolaan lumpur tinja dan dan sampah.

PERATURAN PEMERINTAH PUSAT

PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM & SANITASI DI DAERAH

LAMPIRAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dalam sub urusan air minum dan sanitasi bagi Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota, melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum serta pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan.

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG SUMBER DAYA AIR

PASAL 13 DAN PASAL 15

Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah Provinsi bertugas mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air Minum lintas daerah kabupaten/kota.

Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertugas mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air Minum di daerah kabupaten/kota.

PASAL 5

Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah paling sedikit memuat arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah serta program pengurangan dan penanganan sampah. Program dimaksud memuat target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap dan target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 122 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

PASAL 19

Penyelenggaraan SPAM berlandaskan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM, dan Rencana Induk SPAM.

PASAL 21

Rencana Induk SPAM meliputi perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.

PASAL 5

Target pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 97 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 27/PRT/M/2016 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

PASAL 7 DAN PASAL 8

Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM memuat: skenario penyelenggaraan SPAM; sasaran kebijakan; dan komitmen kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM.

Rencana Aksi Penyelenggaraan SPAM memuat: alternatif sumber pembiayaan; dan kegiatan dan rencana tindak.

PERATURAN DAERAH

Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum & Sanitasi

Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Bagian 1 dari 3

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 -2025

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 jo.
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2018
Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi
Kalimantan Timur

Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2020
Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015
Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kota Samarinda Tahun 2005 -2025

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana

Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017
Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan
Air Minum Kota Samarinda Tahun 2016-2035

Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2018
Kebijakan dan Strategi Kota Samarinda dalam
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013
Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005 -2025

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020
Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung
Balikpapan

Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2018
Kebijakan dan Strategi Kota Balikpapan dalam
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga

PEMERINTAH KOTA BONTANG

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011
Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kota Bontang Tahun 2005 -2025

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 jo.
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Bontang Tahun 2021-2026

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Bontang Tahun 2021-2026

Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2018
Kebijakan dan Strategi Kota Bontang dalam
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga



PERATURAN DAERAH

Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Bagian 2 dari 3

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006 -2025

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tuah
Benua Kutai Timur

Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018
Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum

Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019
Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan
Penyehatan Lingkungan Tahun 2018-2021

Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019
Kebijakan dan Strategi Kabupaten Kutai Timur
dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2005 -2025

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 - 2026

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012
Pelayanan Air Minum Kabupaten Kutai Barat

Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019
Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018 - 2038

Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019
Rencana Aksi Daerah Bidang Air Minum dan
Penyehatan Lingkungan Tahun 2019-2021

Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019
Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik Perkotaan Sendawar

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 -2025

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020
Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air
Minum Tirta Mahakam Menjadi Perusahaan
Umum Daerah Air Minum Tirta Mahakam

Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2015
Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan
Air Minum Kabupaten Kutai Kartanegara

Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018
Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan
Penyehatan Lingkungan Tahun 2018-2021

Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019
Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga

PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021 -2026

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017
Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum

Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020
Rencana Induk Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum Tahun 2020 - 2021

Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019
Kebijakan dan Strategi Kota Balikpapan dalam
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga

PERATURAN DAERAH

Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Bagian 3 dari 3

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005-2025

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005

Perusahaan Daerah Air Minum

Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019

Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga

Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018

Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016-2025

Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021

Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan
Penyehatan Lingkungan Tahun 2019-2023.

Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018

Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan
Sistem Penyediaan Air Minum

PEMERINTAH KABUPATEN PASER

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016

Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum

Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019

Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum
Kabupaten Paser Tahun 2018 -2038

Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019

Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum
dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Paser
Tahun 2018-2021

Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019

Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006

Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Berau Tahun 2006 - 2026

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021

Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2021 - 2026

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau

Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014

Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum
Kabupaten Berau Tahun 2014 -2028

Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018

Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga

SELURUH PERATURAN DAPAT DIAKSES DI
peraturan.bpk.go.id

